

DISPARITAS EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Fuad Hasan dan Ikhsanudin*)

*) Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo
Bangkalan-Madura

ABSTRACT

The objective of this research were to measure and to analyze the disparity of economic growth, to identify the pattern and structure of economic growth, and to know the dependency of economic growth in Bangkalan Regency. This research used time series data during 2001-2006. The data was taken from Central Birou of Statistic (BPS). Analysis method used to 1) indeks of regional inequality) Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil 2) Analysis of Regional typical 3) Analysis of scalogram dan 4) Analysis of Gravitasy. The result of research show that regional disparity of Bangkalan Regency are 0,00309 (small-williamson index) and 0,0388 (entropy index). Analysis of regional typical show that 1) Bangkalan, Kamal, Arosbaya, and Labang are clasified going forward and growth fastly ; 2) Socah, Modung, Burneh, Sepulu, and Tanjung Bumi are clasified developing fastly; 3) Kwanyar and Klampis are clasified going foward depressedly; and 4) Tragah, Blega, Konang, Galis, Tanah Merah, Geger, and Kokop are clasified. Analysis of scalogram show that 1) Tanjung Bumi, Burneh, and Socah had supproting fasility and economic growth above average growth rate; 2) Bangkalan, Kamal, Arosbaya, Labang, Modung, and Sepulu had supporting fasility above average and average of economic growth rate; 3) Tragah, Blega, Kwanyar, Klampis, Konang, Galis, and Tanah Merah had less supporting fasility and under average of economic growth rate; and 4) Kokop and Geger had less economic growt rate with averag Analysis of supporting fasility. Gravitasi show that Bangkalan became center pint for other sub district.

Key words : Disparity of economic growth, Pattern and structure economic growth

PENDAHULUAN

Agenda dari suatu pertumbuhan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, melindungi lingkungan dan memperkuat tatanan sipil. Premis ini menjadi sangat ironis karena di banyak negara, pertumbuhan ekonomi tetap saja menyimpan persoalan yang krusial (kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan).

Meski kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan di atas pada gilirannya menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak memiliki kemampuan

untuk mengakses sumber daya-sumber daya pembangunan (Makmun, 2003:1).

Indonesia adalah negara dengan kebhinekaan yang tinggi di mana perbedaan antardaerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya sumber daya berupa minyak dan juga pertumbuhan pusat perdagangan dan industri terkonsentrasi di beberapa daerah menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan sehingga ketimpangan *output* antardaerah menjadi tinggi (Tadjoeddin, dkk, 2001:6).

Sentralisasi pembangunan, pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi mayoritas pembangunan

daerah di Indonesia saat ini. Pelaksanaan otonomi daerah mencoba mengeliminir dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan sekaligus mencoba mengubah paradigma pembangunan ke arah desentralistis. Walaupun memberikan harapan terhadap pendapatan yang berkeadilan namun kenyataannya tidaklah menjamin pertumbuhan ekonomi tumbuh cepat dan merata di semua daerah. Ada beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya cepat dan ada juga beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya lambat. Hal ini disebabkan tiap daerah memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur yang berbeda-beda, begitu juga dengan investasi. Para investor akan lebih menyukai berinvestasi di daerah yang relatif maju dan memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Potensi sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Bangkalan, utamanya disektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan serta sektor pariwisata, merupakan produk-produk andalan dan investasi yang sangat potensial bagi Kabupaten bangkalan, merupakan peluang besar dalam percepatan pambangunan yang adil dan merata, serta mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan saat krisis ekonomi terjadi, sektor yang mampu bertahan sampai saat ini adalah sektor pertanian. Oleh karena itu pambangunan bidang ekonomi yang berbasis kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan terutama yang berada di wilayah pedesaan .

PDRB Kabupaten Bangkalan tiap tahun mengalami peningkatan. Namun demikian dilihat nilai PDRB per kecamatan terlihat ada gejala disparitas pertumbuhan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Kebijakan untuk mengatasi masalah mengenai disparitas pertumbuhan ekonomi antarkecamatan serta ciri-ciri disparitas tersebut haruslah mengacu pada pendekatan pembangunan daerah, maka strategi pembangunan yang perlu dilakukan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan andalan yang dapat menjadi sentra pertumbuhan perekonomian, pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pembangunan dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terdapat tiga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) disparitas pertumbuhan ekonomi; 2) pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antarkecamatan; dan 3) keterkaitan pertumbuhan ekonomi antarkecamatan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan merupakan data *time series* selama enam tahun, yaitu Tahun 2001-2006 bersumber dari Badan Pusat statistik. Analisis data menggunakan:

1. Indeks Williamson. Indeks ketimpangan regional ini semula digunakan oleh Jeffrey G.Williamson dengan rumus (Sjafrizal, 1997 : 31) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \cdot f_i / n}}{y}$$

Keterangan :

- y_i = menunjukkan pendapatan per kapita di kecamatan i
- y = menunjukkan pendapatan per kapita rata-rata kabupaten
- f_i = menunjukkan jumlah penduduk di kecamatan i
- n = menunjukkan jumlah penduduk kabupaten

Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita dan jumlah penduduk, bernilai antara nol dan satu ($0 < IW < 1$). Apabila nilai indeks mendekati satu berarti memberikan indikator terjadinya disparitas regional yang besar dan sebaliknya apabila nilai indeks yang diperoleh mendekati nol maka berindikasi terjadinya disparitas regional kecil.

2. Indeks Entropi Theil. Indeks ini untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Rumusnya adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004 : 134) :

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) (x_j / X)]$$

Keterangan:

$I(y)$ = menunjukkan Indeks Entropi Theil

y_j = menunjukkan PDRB per kapita kecamatan j

Y = menunjukkan rata-rata PDRB per kapita Kabupaten

x_j = menunjukkan jumlah penduduk kecamatan j

X = menunjukkan jumlah penduduk kabupaten

Indeks Entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah. Apabila Indeks Entropi Theil semakin membesar berarti ketimpangan semakin besar, sebaliknya apabila Indeks Entropi Theil semakin kecil berarti terjadi pemerataan.

3. Analisis tipologi daerah. Alat analisis ini untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (Kuncoro, 2004:118). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, maka daerah dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu :

1. daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding dengan rata-rata Kabupaten Bangkalan;
2. daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Bangkalan;
3. daerah berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten Bangkalan;

4. daerah relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1. Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Daerah

Laju Pertumbuhan (r) \ PDRB per kapita (y)	$y_i > y$	$y_i < y$
	$r_i > r$	Pendapatan dan pertumbuhan tinggi
$r_i < r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan dan pertumbuhan rendah

Sumber : Kuncoro (2004: 118)

Keterangan:

r_i : menunjukkan pertumbuhan ekonomi kecamatan i

r : menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan

y_i : menunjukkan PDRB per kapita kecamatan i

y : menunjukkan rata-rata PDRB per kapita kecamatan

4. Analisis scalogram. Alat analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan fasilitas yang tersedia (Blakely, 1994 : 94-98). Apabila suatu daerah memiliki berbagai fasilitas perkotaan yang relatif tinggi dan lebih lengkap dibandingkan daerah lainnya maka daerah tersebut mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan. Klasifikasi daerah berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya, yaitu:

1. *differentiation* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja;

2. *solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari suatu daerah. Ini dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan;
3. *centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota. Sentralistis ini diukur melalui perkembangan hierarki dan institusi sipil misalnya kantor pos, kantor pemerintahan dan lainnya.

Dalam analisis ini diterapkan penilaian dengan memanfaatkan skor dan beberapa asumsi, dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. fasilitas perkotaan (ekonomi, sosial, dan pemerintahan) yang terdiri dari komponen fasilitas perbankan, pasar, pertokoan, telekomunikasi, terminal dan seterusnya. Masing-masing komponen tersebut dapat dipecah lagi dalam beberapa kelas sesuai dengan kebutuhan, pembagian tersebut didasarkan pada skala pelayanan, atau jumlah tenaga kerja yang digunakan, atau tolok ukur lain sesuai dengan spesifikasi dari komponen yang bersangkutan;
2. masing-masing komponen fasilitas berdiri sendiri, sehingga skor yang ditetapkan tidak tergantung antara komponen satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh komponen yang satu tidak berkaitan dengan komponen yang lainnya;
3. nilai dari masing-masing komponen fasilitas ditentukan nilai yang bulat dan kecil dan nilai tersebut merupakan penggabungan dari nilai kelas-kelas komponen fasilitas;
4. nilai yang diberikan berlaku sama bagi komponen fasilitas yang tersebar pada kecamatan-kecamatan yang diteliti. Hal ini untuk menekankan bahwa penetapan nilai tidak akan mempunyai pengaruh

yang berbeda terhadap perolehan skor masing-masing kecamatan;

5. perbedaan yang diberikan pada masing-masing kelas menunjukkan adanya perbedaan pelayanan yang mampu diberikan kelas tersebut. Sebagai contoh fasilitas perbankan, SPBU, pertokoan, perhotelan didasarkan pada tenaga kerja yang dimanfaatkan, untuk komponen fasilitas kesehatan ditunjukkan dengan fasilitas pelayanan, untuk fasilitas pendidikan didasarkan pada tingkat pendidikan dari TK, SD, SLTP, SMU, Akademi/Universitas. Komponen fasilitas yang lain pembagian kelasnya didasarkan pada spesifikasi yang dimilikinya.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

1. menginventarisasi berbagai fasilitas pada kota/kawasan dan disusun sesuai kelompoknya, yaitu fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan;
2. masing-masing kelompok tersebut dihitung nilainya dengan menggunakan skor sebagai berikut:
 - a. menyusun urutan komponen fasilitas (misalnya perbankan, pasar, rumah sakit dan sebagainya) yang terdapat di kota tersebut berdasarkan pada tingkat *urgensi* (kepentingan), komponen fasilitas tersebut merupakan fungsi pelayanan suatu kota, misalnya untuk kelompok fasilitas ekonomi perkotaan, perbankan, akan ditempatkan pada nomor urut yang lebih tinggi dibandingkan dengan besarnya fungsi kota. Semakin besar kota maka komponen fasilitas perbankan akan semakin meningkat, selain itu perbankan mempunyai peran yang relatif dominan dibandingkan dengan pertokoan dalam konteks pelayanan suatu kota;
 - b. masing-masing komponen fasilitas dibagi dalam beberapa kelas yang disesuaikan dengan skala pelayanan, misalnya pasar sebagai salah satu komponen fasilitas ekonomi perkotaan dibagi dalam lima kelas yang masing-masing

mempunyai skor yang berbeda-beda sebagai berikut: (1) pasar dengan luas bangunan > 30.000 m² mempunyai skor 5; (2) pasar dengan luas bangunan 20.000-30.000 m² mempunyai skor 4; (3) pasar dengan luas bangunan 12.500-20.000 m² mempunyai skor 3; (4) pasar dengan luas bangunan 5.000-12.500 m² mempunyai skor 2; (5) pasar dengan luas bangunan < 5.000 m² mempunyai skor 1.

pengelompokan ini didasarkan pada kemampuan pelayanan, sebagai acuan digunakan standar dari Direktur Jendral Cipta Karya yang menyatakan bahwa untuk setiap 30.000 jiwa penduduk dilayani areal pembelanjaan seluas sekitar 12.500 m² dan untuk setiap 120.000 jiwa penduduk dilayani areal pembelanjaan seluas 30.000 m² ;

- c. masing-masing komponen fasilitas yang telah ditetapkan kelas dan skornya dikalikan dengan jumlah komponen fasilitas yang terdapat pada kota tersebut.
3. penilaian terhadap tingkat kelengkapan fasilitas suatu kota merupakan penjumlahan dari masing-masing fasilitas (ekonomi, sosial, dan pemerintahan).
5. Analisis gravitasi. Menurut Blakely (1994: 105) bahwa penggunaan teknik ini akan dapat menghitung kekuatan relatif dari hubungan komersial antara pusat pertumbuhan yang satu dengan pusat pertumbuhan yang lainnya.

Metode analisis model gravitasi ini digunakan untuk: (1) mengukur kekuatan keterkaitan antara sentra komoditi dengan pusat pengembangan wilayah; (2) menentukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi (sentra-sentra komoditi) dalam sistem jaringan jasa, distribusi dan transportasi. Formulasi rumus untuk menentukan indeks gravitasi sebagai berikut :

$$I_{12} = \frac{P_1 P_2}{d_{12}^2}$$

Keterangan :

I₁₂ = interaksi antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2

d₁₂ = jarak antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (km)

P₁ = penduduk kecamatan 1

P₂ = penduduk kecamatan 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disparitas Antarkecamatan Kabupaten Bangkalan

Disparitas regional di Kabupaten Bangkalan adalah kecil dengan nilai rata-rata indeks Williamson untuk Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 0,00309 dan 0,0388 untuk Indeks Entropi Theil . Namun jika melihat trend yang ada angka indeks ini terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya (Tabel 2 dan Tabel 3). Peningkatan indeks disparitas bila dikaitkan dengan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal pemerataan pertumbuhan ekonomi regional antar kecamatan, maka perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Tabel 2. Indeks Williamson Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 – 2006 dan Trend Tahun 2001 – 2010

Tahun	Indeks Williamson	Trend
2001	0.002746576	0.00268
2002	0.002854851	0.00311
2003	0.003577043	0.00325
2004	0.003087536	0.00322
2005	0.003114160	0.00314
2006	0.003134373	0.00311
2007		0.00326
2008		0.00369
2009		0.00453
2010		0.00590
Rata-rata	0.003085756	

Sumber: Hasil analisis, tahun 2007

Tabel 3. Trend dan Indeks Entropi Theil Kabupaten Bangkalan, 2001-2010

Tahun	Indeks Entropi Theil	Trend
2001	0.0298	0.0257
2002	0.0324	0.0478
2003	0.0709	0.0502
2004	0.0318	0.0424
2005	0.0339	0.0336
2006	0.0339	0.0330
2007		0.0498
2008		0.0933
2009		0.1727
2010		0.2973
Rata-rata	0.038809628	

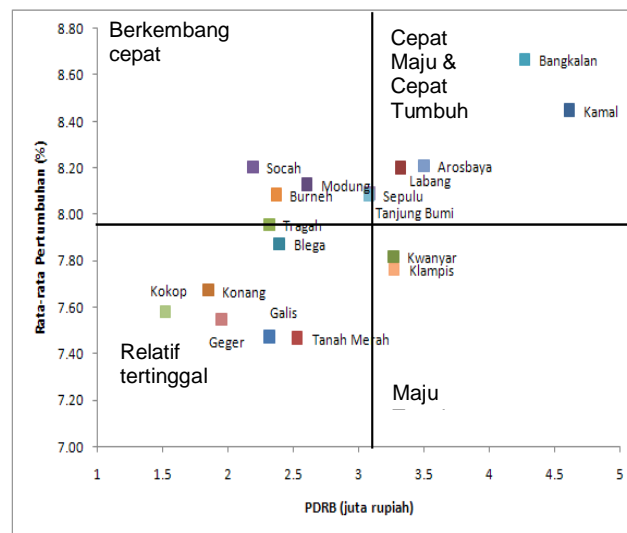
Sumber: Hasil analisis, tahun 2007

2. Tipologi Daerah

Hasil analisis tipologi daerah Kabupaten Bangkalan terdiri dari tiga klasifikasi. *Pertama*, Bangkalan, Kamal, Arosbaya dan Labang berklasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata kecamatan. *Kedua*, Socah, Modung, Burneh, Sepulu dan Tanjung Bumi masuk dalam klasifikasi daerah yang berkembang cepat, karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata namun sumbangan PDRB kurang dari rata-rata. *Ketiga*, Kwanyar dan Klampis kategori daerah yang maju tertekan karna sumbangan PDRB di atas rata-rata dengan pertumbuhan ekonomi kurang dari rata-rata. *Keempat*, Tragah, Blega, Konang, Galis, Tanah Merah, Geger, dan Kokop masuk dalam klasifikasi daerah yang relatif tertinggal karena memiliki nilai PDRB di bawah rata-rata dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata.

Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan, dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, jika dilihat pada tipologi daerah, masih ada 6 kecamatan yang terklasifikasi relatif tertinggal. Dalam hal ini arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal peningkatan pendapatan regional antar kecamatan belum sepenuhnya terealisasi. Untuk itu perlu, dalam hal kebijakan ini, pemerintah kabupaten lebih mengutamakan untuk 6 kecamatan yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan kecamatan lain yang

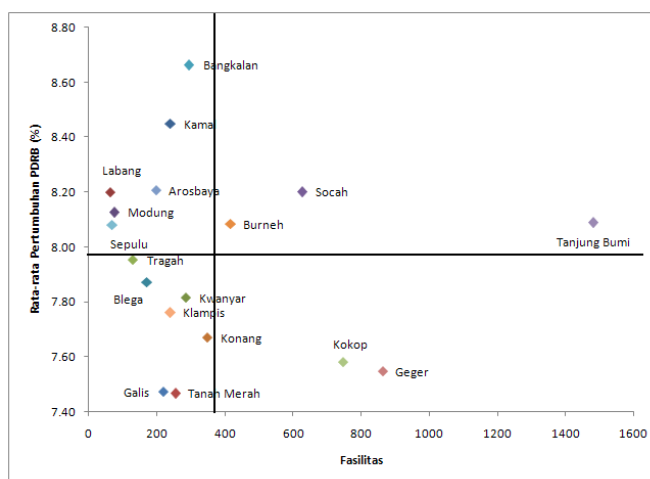
masuk ke dalam kategori cepat maju cepat tumbuh maupun kecamatan-kecamatan yang masuk ke kategori berkembang cepat maupun kecamatan-kecamatan yang masuk dalam klasifikasi maju tertekan. Selengkapnya analisis tipologi daerah kecamatan-kecamatan di Kecamatan Bangkalan ini dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. Pola dan Struktur Perekonomian Kabupaten Bangkalan 2001-2006

3. Analisis Scalogram

Hasil Scalogram dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Scalogram Pertumbuhan Ekonomi dan Fasilitas Pendukung di Kecamatan Wilayah Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan gambar di atas dapat diklasifikasikan kategori pertumbuhan ekonomi berdasarkan Scalogram. Kategori *Pertama*, kecamatan-kecamatan yang

memiliki dukungan fasilitas di atas rata-rata dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, yaitu Tanjung Bumi, Burneh dan Socah. Kecamatan Tanjung Bumi mempunyai infrastruktur jalan untuk transportasi yang sangat bagus, merupakan jalur utara Bangkalan – Sampang, dan juga merupakan sentra industri batik yang sangat terkenal di Madura. Kecamatan Burneh dan Socah merupakan wilayah yang berdekatan langsung dengan pusat kota Bangkalan dan juga merupakan daerah yang dilalui jalan utama menuju wilayah kabupaten lain di pulau Madura. Kecamatan Burneh berada di sebelah selatan kota bangkalan dan merupakan pintu gerbang masuk kota dan wilayah madura yang lain. Sedangkan Kecamatan Socah berada disebelah timur kota Bangkalan dan menjadi calon gerbang masuk ke madura melalui Jembatan Suramadu. Oleh karena itu, kemajuan atau pembangunan di kota bangkalan, dampaknya akan dirasakan kedua wilayah kecamatan tersebut. Apalagi untuk menyongsong jembatan suramadu, kecamatan socah mempersiapkan diri dengan program dan fasilitas yang menuju ke sana.

Kategori *kedua*, kecamatan yang memiliki dukungan fasilitas di atas rata-rata dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata. yaitu Bangkalan, Kamal, Arosbaya, Labang, Modung dan Sepulu. Kategori *ketiga*, kecamatan-kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata dengan dukungan fasilitas yang relatif minim, yaitu: Tragah, Blega, Kwanyar Klampis, Konang, Kecamatan Galis, dan Tanah Merah. Kategori *keempat*, yaitu kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dengan dukungan fasilitas di atas rata-rata, yaitu Kecamatan Kokop dan Kecamatan Geger.

4. Analisis Gravitasi

Konsep dasar dari analisis gravitasi adalah membahas mengenai ukuran dan jarak antara dua tempat yaitu pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya (kecamatan terdekat) dan seberapa jauh suatu daerah pusat pertumbuhan mempengaruhi daerah sekelilingnya. Semakin tinggi nilai indeksnya maka semakin erat interaksi antara kedua kota. Interaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk hubungan pelayanan ekonomi maupun sosial dari

masyarakat. Hasil analisis gravitasi pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan membentuk pola-pola sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Indeks Gravitasi Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

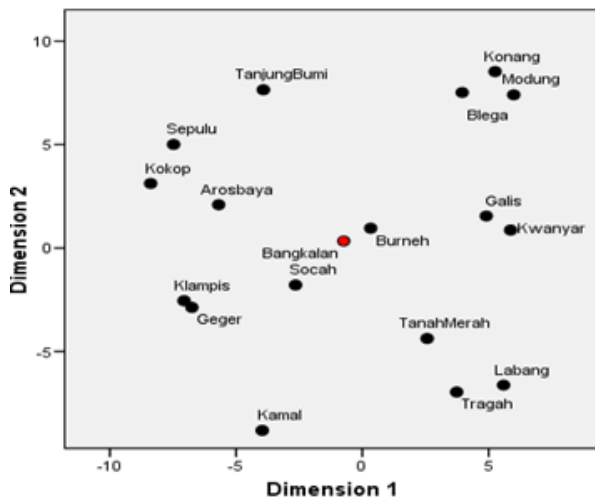
No	Kecamatan	Rerata Indeks Gravitasi
1	Kamal	3.481843
2	Labang	3.236699
3	Kwanyar	5.390723
4	Modung	2.325468
5	Blega	4.228162
6	Konang	1.689722
7	Galis	6.129919
8	TanahMerah	6.662482
9	Tragah	3.922408
10	Socah	6.861727
11	Bangkalan	15.21804
12	Burneh	12.9421
13	Arosbaya	6.536457
14	Geger	5.093606
15	Kokop	4.346115
16	TanjungBumi	4.332398
17	Sepulu	4.210319
18	Klampis	6.306003

Sumber: Hasil analisis, tahun 2007

Hasil perhitungan analisis gravitasi berdasarkan Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Bangkalan (15,218) memiliki keterkaitan dan interaksi yang kuat dan menjadi pendukung bagi pusat pertumbuhan. menunjukkan hasil analisis gravitasi antar kecamatan. Hasil menunjukkan Kecamatan Bangkalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan menjadi *center point* untuk kecamatan-kecamatan lain. Artinya ketergantungan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan Kecamatan Bangkalan adalah tinggi.

Interaksi antarkecamatan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan analisis gravitasi, apabila dikaitkan dengan ketersediaan fasilitas perkotaan masing-masing kecamatan sangat berkaitan. Kecamatan Burneh dan Socah selain memiliki ketersediaan fasilitas lebih tinggi dan lengkap juga mempunyai keterkaitan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Sedangkan pola hubungan antar kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Pola Hubungan Antar Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

Adanya hasil di atas menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan dan pengangguran terutama terjadi di kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangkalan mengagendakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dalam agenda ini, pemerintah kabupaten menekankan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penekanan ini didasarkan pada kenyataan bahwa potret kemiskinan yang senantiasa membelenggu masyarakat marjinal dan terbelakang. Dengan adanya ekonomi kerakyatan, masyarakat dilibatkan pada proses produksi dan mekanisme pasar. Pemberdayaan rakyat juga diharapkan mampu menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh rakyat agar dapat berkemampuan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Langkah riil yang ditempuh pemerintah kabupaten adalah dengan meningkatkan kinerja dan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi agar lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah tersebut, ekonomi kerakyatan dan koperasi diharapkan tumbuh dan mampu membebaskan diri dari belenggu marjinalisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Disparitas pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan relatif rendah akan tetapi terjadi kecenderungan peningkatan disparitas setiap tahun.

Hasil analisis tipologi daerah adalah *pertama* Bangkalan, Kamal, Arosbaya dan Labang, berklasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh. *Kedua*, Sochah, Modung, Burneh, Sepulu dan Tanjung Bumi berklasifikasi daerah yang berkembang cepat, *Ketiga*, Kwanyar dan Klampis termasuk dalam kategori daerah yang maju tertekan. *Keempat*, Tragah, Blega, Konang, Galis, Tanah Merah, Geger, dan Kokop berklasifikasi daerah yang relatif tertinggal.

Hasil analisis Scalogram. *Pertama*, kecamatan-kecamatan berfasilitas di atas rata-rata dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, yaitu Tanjung Bumi, Burneh dan Sochah. *Kedua*, kecamatan berfasilitas di atas rata-rata dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata, yaitu Bangkalan, Kamal, Arosbaya, Labang, Modung dan Sepulu. *Ketiga*, kecamatan-kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata dengan dukungan fasilitas relatif minim, yaitu: Tragah, Blega, Kwanyar Klampis, Konang, Kecamatan Galis, dan Tanah Merah. *Keempat*, kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dengan dukungan fasilitas di atas rata-rata, yaitu Kecamatan Kokop dan Kecamatan Geger.

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa Bangkalan menjadi *center point* untuk kecamatan-kecamatan lain.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan pembangunan fisik di daerah-daerah yang relatif tertinggal seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pasar.
2. Perlu adanya spesifikasi wilayah di Kabupaten Bangkalan, artinya setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan memiliki keunggulan masing-masing oleh karena itu perlu prioritas pembangunan yang ditekankan pada komoditas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, E.J, 1994, *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, 2nd edition
- Haeruddin, A, 2001, “Identifikasi Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Soppeng, 1994/1995 – 1999/2000”, *Tesis S-2*, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bagian Penerbitan AMP YKPN, Yogyakarta
-, 2002, *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Indonesia*, UPP AMP YKPN Yogyakarta
-, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang* , Erlangga, Jakarta.